

**UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK MASUK
KE DALAM PERDAMAIAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Oleh

Deddi Hotlan Marbun

2140050603



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK MASUK
KE DALAM PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Deddi Hotlan Marbun

2140050603



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddi Hotlan Marbun
NIM : 2140050603
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Upaya Hukum Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Tidak Masuk ke Dalam Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 3 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Deddi Hotlan Marbun
2140050603



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Deddi Hotlan Marbun
NIM : 2140050603
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : UPAYA HUKUM KREDITOR
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG YANG
TIDAK MASUK KE DALAM
PERDAMAIAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 03 Juli 2026

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093

Pdt. Dr. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H
NIP/NUPTK. 6660744645130072

Ketua Program Studi

Dekan

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NIP/NUPTK: 5759741642230062

(Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
NIP/NUPTK. 0557759660138022)



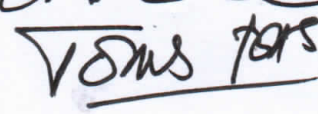
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 03 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Deddi Hotlan Marbun
NIM : 2140050603
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK
MASUK KE DALAM PERDAMAIAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Ketua	
2. Pdt. Dr. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddi Hotlan Marbun
NIM : 2140050603
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Upaya Hukum Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Tidak Masuk ke Dalam Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2026

Deddi Hotlan Marbun
2140050603



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal: Analisis Yuridis Normatif terhadap Ketentuan Hukum dan Upaya Penyelesaian Sengketa”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Sarjana serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan koptribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di program studi Hukum, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis.

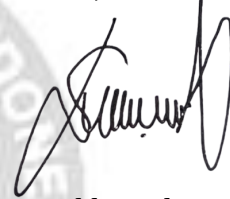
Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan Dr. Hendri Jayadi S.H., M.H., sebagai Wakil Rektor III, Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, Selaku dosen pembimbing pertama yang membantu menyelesaikan skripsi dan selalu memberi saran dalam penulisan skripsi penulis.
5. Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua yang selalu membantu memperbaiki penulisan dan memberi saran dalam penyusunan skripsi penulis.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segara rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati

Jakarta, 3 Juli 2026



Deddi Hotlan Marbun
2140050603



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teori	11
a. Teori Kepastian Hukum	11
b. Teori Keadilan Hukum.....	13
F. Kerangka Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Teoritis.....	22
1. Tinjauan Mengenai Teori Kepastian Hukum.....	22

2. Tinjauan Mengenai Teori Keadilan Hukum	25
B. Tinjauan Konseptual	27
1. Tinjauan Umum Mengenai Debitor dan Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	27
2. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	29
3. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	34
BAB III	40
UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR YANG MEMILIKI HAK TAGIH DALAM PERDAMAIAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	40
A. Melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	40
B. Kreditor Yang Bukan Merupakan Pihak Dalam PKPU Tidak Mengikat Perdamaian PKPU	48
C. Kreditor Harus Memastikan Bahwa Dirinya Tidak Telat Dalam Mengajukan Tagihan Untuk Dapat Diakui Dalam PKPU Apabila Kreditor Berkehendak Tunduk Dalam Perdamaian PKPU	54
D. Kreditor Di Luar Mekanisme PKPU Saat Berjalannya PKPU Tidak Memiliki Ruang Bergerak Secara Hukum	56
BAB IV	60
PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN PKPU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARA KREDITOR	60
A. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Debitor PKPU Untuk Menjatuhkan Debitor PKPU Menjadi Pailit.....	60
B. Itikad Tidak Baik Debitor Dalam Menjalankan PKPU Menjadi Dasar Validitas Bagi Kreditor Yang Tidak Ikut Serta Dalam Perdamaian PKPU Untuk Memohonkan Debitor Menjadi Pailit.....	67
BAB V	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Deddi Hotlan Marbun
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2140050603
C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
D. Judul Skripsi : Upaya Hukum Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Tidak Masuk Ke Dalam Perdamaian Penundaan
E. Jumlah Halaman : Kewajiban Pembayaran Utang
F. Kata Kunci : i-xii + 82
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian PKPU, Kreditor, Kepastian
G. Ringkasan Isi : Hukum, Keadilan Hukum.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perdamaian guna menghindari kepailitan. Namun, dalam praktiknya terdapat permasalahan ketika terdapat kreditor yang memiliki hak tagih terhadap debitor tetapi tidak diikutsertakan atau tidak terdaftar dalam proses perdamaian PKPU. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum kreditor tersebut serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan atas hak tagihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor yang tidak masuk ke dalam perdamaian PKPU serta menganalisis kemungkinan pembatalan perdamaian PKPU yang berimplikasi pada pernyataan pailit terhadap debitor beserta akibat hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor yang tidak terakomodasi dalam perdamaian PKPU tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU baru maupun upaya hukum lainnya sepanjang hak tagihnya belum diselesaikan dan tidak terikat secara sah dalam perdamaian sebelumnya. Selain itu, kreditor di luar PKPU dapat mengajukan pembatalan perdamaian apabila dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik, penyalahgunaan mekanisme PKPU, atau pengabaian hak kreditor secara tidak patut.

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, perlindungan terhadap kreditor diperlukan untuk menjamin kejelasan status hak tagih dan kedudukan hukumnya. Sementara itu, berdasarkan Teori Keadilan Hukum, setiap kreditor harus memperoleh perlakuan yang proporsional dan tidak dirugikan oleh perdamaian yang tidak melibatkan dirinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditor di luar perdamaian PKPU menjadi penting untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian utang piutang.

- H. Daftar Acuan : 31 buku + 12 Artikel Jurnal
I. Dosen Pembimbing 1 : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing 2 : Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, STh, S.H. M.H.

ABSTRACT

- A. Name : Deddi Hotlan Marbun
B. Student IDE Number : 2140050603
C. Departement : Economy law
D. Title : *Legal Remedies Of Creditors In Postponement Of Debt Payment Obligations That Are Not Included In The Peacegate Of Postponement Of Debt Payment Obligations*
E. Number of pages : i – xii + 82 Pages
F. Keywords : *Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), Settlement Agreement, Creditors, Legal Certainty, Theory of Justice.*
G. Summary :

The Suspension of Debt Payment Obligations (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU*) is a legal mechanism designed to provide debtors with an opportunity to restructure their debts through a settlement agreement in order to avoid bankruptcy. In practice, however, legal issues arise when certain creditors possessing valid claims against the debtor are not included or registered in the PKPU settlement process. This situation creates uncertainty regarding the legal status of such creditors and the legal remedies available to protect their rights.

This study aims to analyze the legal remedies available to creditors excluded from a PKPU settlement agreement and to examine the possibility of annulling a PKPU settlement, which may subsequently lead to the debtor's bankruptcy, along with its legal consequences. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through a prescriptive legal approach. The results indicate that creditors whose claims are not accommodated in a PKPU settlement retain legal standing to file a new PKPU petition or pursue other legal remedies, provided that their claims have not been resolved and they are not legally bound by the previous settlement.

Furthermore, creditors outside the PKPU process may seek the annulment of a settlement agreement if bad faith, abuse of the PKPU mechanism, or improper exclusion of creditor claims can be proven. From the perspective of Legal Certainty Theory, protection of excluded creditors is necessary to ensure clarity regarding their legal status and claim rights. Meanwhile, according to the Theory of Justice, every creditor must receive fair and proportional treatment in debt settlement proceedings. Therefore, legal protection for creditors excluded from PKPU settlements is essential to uphold legal certainty and justice in debt restructuring and insolvency proceedings.

- H. References : 31 buku + 12 artikel jurnal
I. Supervisor I : Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
J. Supervisor II : Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th, S.H., M.H.